

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

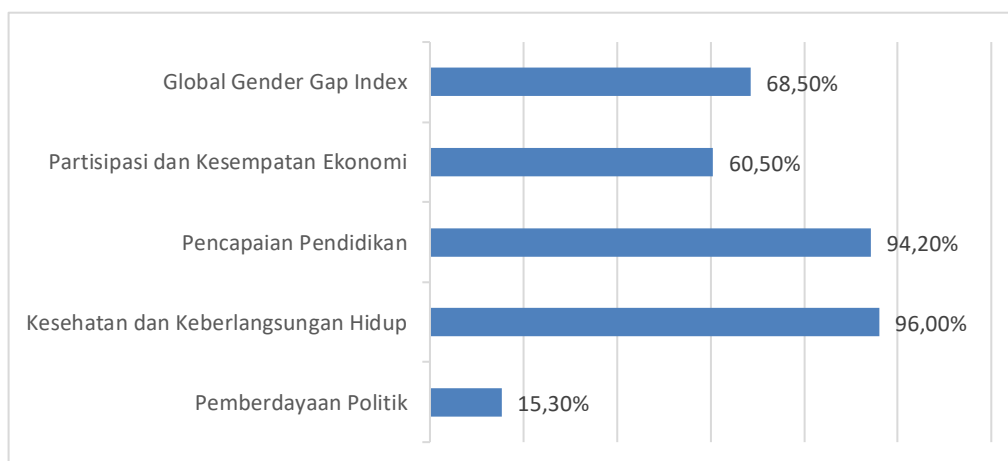
### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan berkelanjutan merupakan serangkaian langkah pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia secara optimal dan seimbang melalui penyelarasan dari keduanya untuk dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan tetap memikirkan dan mempersiapkan kebutuhan generasi mendatang. Secara konsep, hal ini merupakan bentuk perubahan bertahap pada tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaatnya tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang tertinggal (Masruchiyah & Laratmase, 2023). Dalam kerangka pembangunan nasional, penyediaan layanan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan menyediakan layanan yang adil, transparan, dan inklusif, diharapkan pemerintah dapat menjamin bahwa semua warga negara merasakan manfaat dari pembangunan. Dengan demikian, pelayanan publik yang didasarkan pada asas keadilan sosial dan kesetaraan menjadi dasar utama untuk menciptakan kesejahteraan bersama (Prasty, 2023).

Sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender berfokus pada penghapusan semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dengan memastikan bahwa mereka mempunyai peluang setara untuk mengakses, berpartisipasi, dan andil dalam pengambilan keputusan di segala aspek kehidupan. Melalui berbagai targetnya, hal ini juga mendorong pengakuan

atas peran serta kontribusi perempuan, meningkatkan kemandirian secara ekonomi, dan memperkuat kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan di semua tingkatan (Masruchiyah & Laratmase, 2023). Namun, meski sudah menjadi agenda global, masih banyak tantangan dan kesenjangan yang muncul dalam penerapannya, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Berdasarkan *Global Gender Gap Index* (2024) dari *World Economic Forum*, kesetaraan gender global saat ini baru mencapai 68,5%, yang artinya masih ada sekitar 31,5% kesenjangan yang belum tertutup. Dari empat dimensi yang diukur, yaitu partisipasi dan kesempatan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan serta keberlangsungan hidup, dan pemberdayaan politik, kesetaraan paling tinggi baru terlihat di bidang kesehatan dan pendidikan saja. Sementara itu, kesenjangan terbesar masih terlihat di bidang ekonomi dan politik yang menunjukkan bahwa meskipun secara teori kesetaraan gender ditetapkan sebagai prioritas pembangunan global, realisasinya masih sering terkendala oleh ketimpangan struktural dan keterbatasan akses untuk perempuan di bidang ekonomi serta politik.



**Grafik 1. 1 Persentase Tingkat Kesetaraan Gender Global Tahun 2024**

Sumber: Diolah Peneliti, *World Economic Forum* (2025)

Indonesia berada di posisi ke-100 dari total 146 negara yang disurvei, dengan skor kesetaraan gender sebesar 68,6%. Secara data, angka ini memang mengalami kenaikan 3,2 persen sejak 2006, akan tetapi peringkat Indonesia menunjukkan penurunan 13 tingkat dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh keterbatasan data mengenai keterwakilan perempuan di parlemen, dan secara umum hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup besar di beberapa bidang. Misalnya, pada subsindeks partisipasi dan peluang ekonomi, tingkat kesetaraan baru mencapai 66,7%, menandakan masih ada kesenjangan besar pada beberapa indikator, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja dan jabatan kepemimpinan yang masih rendah. Di sisi lain, pemberdayaan politik masih baru mencapai 13,8%, yang menandakan partisipasi dan keterwakilan perempuan di dunia politik masih sangat minim. Sebaliknya, terdapat kemajuan yang cukup baik di bidang pendidikan mencapai 97,1% dan pada bidang kesehatan, yang mencapai 97% (World Economic Forum, 2024).

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah berupaya mengintegrasikan isu gender ke dalam setiap kebijakan pembangunan melalui berbagai regulasi dan instrumen pengarusutamaan gender, seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Regulasi ini menggarisbawahi krusialnya jaminan atas kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, serta pemenuhan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan di seluruh sektor. Aksentuasi terhadap signifikansi peran perempuan ini mulai teraktualisasi melalui pengadopsian pendekatan program perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*)

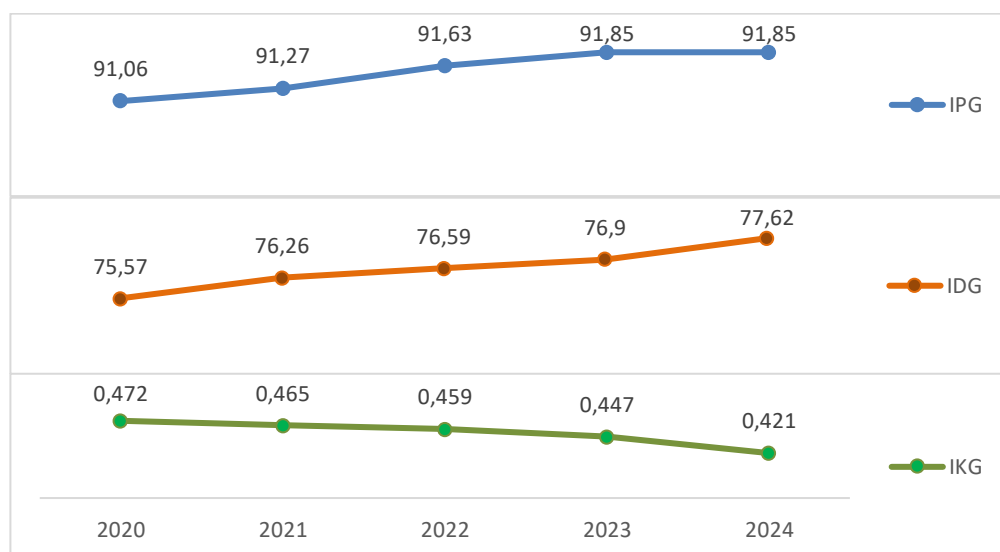
(Rosramadhana et al., 2022). Keseimbangan gender tersebut memegang peranan vital sebagai pilar utama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, guna menggaransi bahwa baik pria maupun wanita memiliki peluang yang sejajar untuk berkontribusi, mengakses berbagai sumber daya, serta menikmati hasil pembangunan dengan cara yang seimbang. Upaya ini tidak hanya sebatas administratif dan normatif, tapi juga mampu mengukur melalui berbagai indikator pembangunan gender yang telah disusun secara nasional.

Dalam rangka memetakan capaian kesetaraan jender, pemerintah Indonesia mengandalkan serangkaian parameter statistik utama yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Rumpun data makro tersebut diolah secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam wujud metadata indikator statistik (Ikhwan et al., 2024). Secara umum, keberhasilan ini diukur melalui IPM, yang mencerminkan capaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nilai IPM secara langsung memengaruhi IPG, yang merupakan rasio antara IPM laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan seberapa setara hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh keduanya. Selanjutnya, IDG menilai seberapa besar partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan pengambilan keputusan publik lewat indikator seperti kontribusi pendapatan kerja, representasi keterwakilan di parlemen, serta posisi manajerial dan profesional. Sedangkan IKG menunjukkan seberapa jauh pembangunan manusia yang belum optimal akibat adanya ketimpangan gender yang dapat dari dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Ketiga indeks ini

saling terhubung dan memberikan gambaran lengkap tentang tingkatan kesetaraan gender di Indonesia, sekaligus menjadi dasar untuk menilai efektivitas berbagai program pemberdayaan perempuan.

Nilai IPG, IDG, dan IKG di tingkat nasional dapat memberikan gambaran nyata kondisi kesetaraan gender saat ini. Analisis terhadap data ini penting untuk melihat seberapa jauh perempuan sudah berdaya di bidang ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk memahami tantangan yang masih perlu diatasi agar keadilan dalam kesetaraan gender benar-benar mampu terealisasi. Secara keseluruhan, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, capaian di Indonesia menunjukkan tren perbaikan yang cukup stabil dalam lima tahun terakhir, meski dengan laju yang relatif lambat. IPG naik dari 91,06 pada 2020 menjadi 91,85 pada 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024b), dengan kenaikan 0,79 poin yang menandakan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan semakin mendekati kesetaraan. IDG juga menunjukkan peningkatan dari 75,57 pada 2020 ke 77,62 pada 2024, menunjukkan kemajuan dalam partisipasi wanita di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan publik (Badan Pusat Statistik, 2024c). Sebaliknya, instrumen IKG justru menunjukkan tren positif melalui penurunan indeks dari 0,472 di tahun 2020 ke angka 0,421 pada 2024. Hal tersebut menandakan bahwa ketimpangan jender, khususnya dalam variabel derajat kesehatan reproduksi, pemenuhan pemberdayaan, dan kontribusi pasar kerja, mulai tereduksi meski laju anggarannya berjalan relatif lambat (Badan Pusat Statistik, 2024a).

Hubungan ketiga indeks tersebut sangat erat, di mana IPG dan IDG idealnya berbanding terbalik dengan IKG. Naiknya IPG dan IDG mencerminkan telah banyak kesetaraan dan pemberdayaan tercapai, dan biasanya diikuti dengan penurunan IKG (Ikhwan et al., 2024). Sehingga, semakin rendah IKG, makin baik kondisi kesetaraan gender dimana akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, politik, dan pekerjaan makin setara dengan laki-laki. Namun demikian, meski menunjukkan hasil yang positif, kesetaraan gender yang sepenuhnya ideal masih belum tercapai. Ketimpangan pada aspek ekonomidan pengambilan keputusan masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi melalui kebijakan dan program afirmatif yang lebih kuat.



**Grafik 1.2 IPG, IDG, dan IKG Indonesia Tahun 2020-2024**

Sumber: Diolah Penulis, BPS (2024)

Di tingkat daerah, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai kesetaraan gender. Berdasarkan data BPS (2024b, 2024c), IPG dan IDG pada Provinsi Jawa Timur menunjukkan

kenaikan dalam kurun waktu lima tahun, yang akhirnya berdampak positif juga dengan adanya penurunan pada angka IKG. Akan tetapi, meski ada kemajuan ini, IDG Provinsi Jawa Timur masih ada pada angka di bawah rata-rata nasional. Kesenjangan ini jelas menunjukkan bahwa perempuan di Jawa Timur masih rentan menghadapi hambatan struktural dan sosial yang cukup serius. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kesetaraan gender perlu diperkuat bukan hanya dengan meningkatkan kapasitas secara ekonomi, tetapi juga melalui upaya perlindungan yang lebih baik dan partisipasi sosial yang lebih aktif.



**Grafik 1.3 IPG, IDG, dan IKG Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024**

Sumber: Diolah Penulis, BPS (2024)

Salah satu kelompok perempuan yang tengah berjuang untuk mencapai kesetaraan gender di bidang ekonomi dan sosial adalah para perempuan pengemudi ojek *online*. Keberadaan mereka dalam sektor transportasi daring ini menunjukkan betapa kuatnya semangat untuk mandiri dan berpartisipasi aktif dari kaum perempuan di sektor informal, terutama di tengah keterbatasan akses terhadap

pekerjaan formal yang ramah bagi perempuan. Sebagian besar dari mereka memilih pekerjaan ini karena alasan ekonomi, yaitu untuk membantu keperluan keluarga karena penghasilan dari suami yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sistem kerja ojek *online* yang berbasis aplikasi ini menawarkan fleksibilitas waktu dan kemudahan akses kerja, sehingga memungkinkan perempuan tetap menjalankan peran domestik dalam rumah tangga sembari memperoleh penghasilan. Dalam konteks *gig economy*, pola kerja semacam ini kerap dipandang sebagai peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi (Dinansyah et al., 2023).

Akan tetapi, dibalik semangat tersebut mereka harus menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial yang cukup berat. Perempuan ojol sering kali mendapat stigma sosial, stereotip, dan diskriminasi karena bekerja di ruang publik yang dianggap lebih cocok untuk laki-laki (Aries Kurniawan, 2024). Saat di lapangan, mereka juga menghadapi risiko dan kerentanan tinggi, termasuk pelecehan seksual di jalan, seperti komentar tidak pantas, hingga tindakan fisik dari pengguna jalan atau penumpang. Situasi tersebut menambah tekanan psikologis bagi perempuan ojol dan menunjukkan bahwa ruang publik belum sepenuhnya aman dan ramah bagi pekerja perempuan. Selain mencari nafkah, mereka juga masih harus menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, di mana hal ini menunjukkan adanya beban ganda pada perempuan yang berprofesi sebagai pengemudi ojol dimana kondisi ini sering kali membuat mereka kekurangan waktu untuk mengembangkan diri atau beristirahat sejenak (Alifina, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ojek *online* membuka peluang partisipasi ekonomi

bagi perempuan, realitas kerja yang mereka hadapi masih menunjukkan adanya kerentan dan ketimpangan gender.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah berfokus pada upaya pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan ini pada dasarnya berkaitan dengan kekuasaan. Batliwala dalam Cornwall (2014) menyebutkan kekuasaan pada dasarnya mengakar pada dua dimensi krusial. Dimensi pertama berupa kendali penuh terhadap aset-aset berwujud maupun takberwujud, seperti aspek fisik, sumber daya manusia, kapasitas intelektual, instrumen finansial, hingga kontrol atas eksistensi diri sendiri. Dimensi kedua mencakup dominasi pada ranah ideologis yang termaktub dalam bentuk doktrin kepercayaan, internalisasi nilai, serta artikulasi sikap. Sehingga jika kekuasaan berarti memiliki kendali, maka pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh kendali tersebut. Pemberdayaan dalam hal ini dipahami sebagai proses meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri perempuan agar dapat mengakses sumber daya, membuat keputusan, dan turut aktif dalam pembangunan yang dapat dilakukan melalui penerapan sebuah kebijakan, program ataupun pemberian akses berupa pembelajaran dan pelatihan yang membangun.

Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) mengambil langkah strategis untuk menekankan pentingnya perlindungan, dan penguatan peran perempuan dengan meluncurkan inovasi pemberdayaan yang responsif gender dalam program pemberdayaan Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL), langkah ini menjadi bagian

integral dari eksekusi urusan wajib non-pelayanan dasar pada klaster pemberdayaan perempuan, sebagaimana telah diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam operasionalisasinya, penyelenggaraan program GASPOL ini bersandar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Selain itu, pemberdayaan ini juga merupakan wujud pelaksanaan dari Perpres No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, regulasi ini menggarisbawahi pentingnya mengawal agenda pemberdayaan sebagai representasi dari investasi modal insani, yang menjadi ruh utama pembangunan nasional. Implementasinya ditempuh melalui pengarahan dan penajaman kompetensi masyarakat, yang diorientasikan pada peningkatan kecakapan hidup dengan mendayagunakan seluruh potensi lokal secara efektif dan efisien.

Program GASPOL bermula dari adanya pertemuan antara Gubernur Jawa Timur dengan sejumlah perempuan pengemudi ojek online di gedung Islamic Centre Surabaya untuk menyampaikan keluhan kesahnyanya dalam menjalani keseharian sebagai pengemudi ojek *online*. Sebagian besar dari mereka memilih menjadi pengemudi ojek *online* karena tuntutan ekonomi, selain itu mereka juga tetap harus mengurus keperluan rumah tangga. Kondisi ini menempatkan mereka dalam kondisi yang rentan mengalami kekerasan seksual saat bekerja dan tidak jarang menerima diskriminasi karena jenis kelamin mereka. Kesibukan ini juga

menjadikan mereka harus bekerja sejak pagi hingga malam hari dan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan diri.

Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi DP3AK Provinsi Jawa Timur (2022), program pemberdayaan GASPOL resmi dibentuk pada 27 Januari 2022 yang dalam pelaksanaannya mendasar pada surat keputusan yang diterbitkan setiap tahun untuk mengatur terkait pelaksanaannya. Sehingga GASPOL pertama kali resmi berdiri dan dijalankan di Kota Surabaya dengan tempat pelatihan dan pemberdayaan yang dilaksanakan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jatim dan Kantor Dinas DP3AK Jatim. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan perempuan pengemudi ojek online melalui akses pengembangan diri dan juga rohani, serta membantu mereka menjadi mandiri. Program pemberdayaan ini memiliki kelas pelatihan yang dapat diikuti oleh seluruh perempuan ojol. Kelas pelatihan tersebut terdiri dari kelas politik, kelas hukum, kelas pelatihan bidang ekonomi seperti memasak, merias (*beauty class*), kerajinan tangan (*handycraft*), dan kelas pelatihan di bidang sosial seperti kelas pembinaan rohani, dan pertahanan diri (*jujitsu*). Melalui berbagai kelas pelatihan tersebut, target dari inovasi program ini adalah berupaya untuk membantu mereka meningkatkan taraf perekonomian, menekankan angka kekerasan, serta menjadikan mereka perempuan yang berdaya dan berakhlak. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga upaya pemberdayaan yang berkelanjutan.

“Terkait pemberdayaan perempuan, Provinsi Jatim berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan terhadap pembangunan,” ujar Bobby Soemiarsono, Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Ia menjelaskan bahwa, “Pemprov Jatim terus mendorong keterlibatan

perempuan dalam segala aspek, karena pemberdayaan perempuan bukan hanya isu nasional, melainkan perhatian dunia.” Lebih lanjut, Bobby menyampaikan bahwa salah satu upaya Pemprov Jatim adalah melalui Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL), yakni kegiatan pembelajaran untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya.

Sumber: [https://www.antaranews.com/berita/4165398/ipg-tinggi-pemprov-jatim-pacu-partisipasi-perempuan-dalam-pembangunan#google\\_vignette](https://www.antaranews.com/berita/4165398/ipg-tinggi-pemprov-jatim-pacu-partisipasi-perempuan-dalam-pembangunan#google_vignette), Diakses pada 27 Oktober 2025.

Sejak program pemberdayaan GASPOL berjalan, kelompok perempuan pengemudi ojol di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya merasakan dampak positif karena mampu memberikan manfaat secara merata tanpa diskriminasi pada ojol perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan, sosialisasi, advokasi dan pendampingan yang cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan mereka, utamanya dari aspek keselamatan dan peningkatan keterampilan ekonomi. Namun demikian, meski secara tujuan program ini memiliki terobosan positif untuk memberikan pelayanan berbasis kesetaraan gender lewat pemberdayaan, implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya tantangan. Misalnya, tingkat partisipasi peserta masih belum maksimal dan cenderung fluktuatif, karena banyak dari mereka yang harus mempertimbangkan antara ikut pelatihan atau tetap bekerja untuk mendapatkan uang harian. Selain itu, dukungan modal dan pelatihan usaha yang diberikan oleh pemerintah masih terbatas dan belum sepenuhnya berkelanjutan akibat adanya aturan yang membuat penerima manfaat merasa kesusahan untuk mengembangkan menjadi usaha mandiri yang stabil (Marlia et al., 2024).

Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi (monev) DP3AK, peserta GASPOL sejak tahun 2022 hingga 2025 berjumlah 215 orang. Dalam tujuan utama

nya, pemberdayaan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf perekonomian dengan memberikan kelas pelatihan dengan harapan mampu memberikan dukungan untuk mereka dapat berdaya dalam bidang usaha, baik itu yang sudah mereka tekuni sejak lama maupun dari hasil pelatihan yang mereka dapatkan. Sehingga hal tersebut dapat membuat mereka beralih pada situasi yang lebih aman dibandingkan jika mereka terus bekerja di jalan. Namun, upaya pemberdayaan ini masih belum menunjukkan pencapaian tujuannya secara optimal. Dari 215 anggota GASPOL, tercatat sekitar 110 anggota yang dalam tingkat persentase sebesar 51% dari keseluruhan anggota telah memiliki usaha sendiri. Meski secara persentase menunjukkan capaian yang cukup baik, masih terdapat sekitar 49% anggota lainnya yang sampai saat ini masih belum dapat memiliki usaha sendiri sehingga mereka masih pada pekerjaan utama mereka sebagai pengemudi ojol. Selain berkaitan dengan peralihan pekerjaan, harapan dari adanya program ini tentunya adalah mengurangi waktu (*on bid*) para perempuan ojol untuk berada di jalan. Akan tetapi, baru sekitar 107 anggota dari total 215 orang yang telah mengurangi bahkan sudah tidak lagi disibukkan dengan kesibukan mereka di jalan. Data tersebut menunjukkan bahwa tujuan dan harapan program pemberdayaan ini masih memerlukan perhatian dan upaya yang lebih lagi dengan tidak hanya berfokus pada strategi pendampingan, tetapi juga mempelajari apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan mereka atas situasi tersebut.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlia et al., (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online dalam Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota

Surabaya”. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa efektivitas berdasarkan imlementasi dan indikator keberhasilan program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) masih menunjukkan adanya prasangka gender dari masyarakat yang belum tuntas, selain itu juga keterbatasan dana, sumber daya, dan pemanfaatan teknologi dan informasi menjadi penghambat yang berdampak pada dukungan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, dan tindak lanjut pasca program masih kurang.

Kinerja organisasi sektor publik tidak hanya diukur dari seberapa besar masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan, tetapi juga dari sejauh mana mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat secara nyata. Menurut pandangan Moore (1995; 2013), suatu organisasi publik dapat dikatakan mampu menciptakan nilai publik atau *public value* apabila tindakan dan pemikiran strategisnya dalam mencapai kompleksitas layanan melalui kebijakan, program, dan pelayanan publik yang diberikan mampu memberikan manfaat dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau kebutuhan masyarakat. Stoker dalam penelitian Celia & Andono (2023), bahwa keberhasilan program pemerintah bukan hanya dinilai dari capaian secara administratif atau efektivitas, tetapi juga dari seberapa jauh ia menciptakan nilai publik. Sehingga, tidak hanya melihat dari hasil yang dicapai, tetapi juga pada relevansi dan dampak pada layanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan mempertimbangkan aspek yang mempengaruhi penciptaan nilai publik

Konsep *public value* telah banyak digunakan dalam berbagai kajian administrasi publik untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program

mampu memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dalam konteks program pemberdayaan, *public value* tidak hanya dilihat dari keberhasilan mencapai target program, tetapi juga dari kemampuan program dalam menciptakan manfaat sosial, ekonomi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat legitimasi pemerintah sebagai penyelenggara program. Anindya Putri dan Dwi Harsono (2024) dalam penelitiannya mengenai *Public Value* dalam Model Kalurahan Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) di Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan bahwa *public value* menjadi landasan penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui penciptaan nilai ekonomi, sosial, pendidikan, serta dukungan legitimasi dalam pelaksanaan program. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep *public value* telah digunakan untuk memahami nilai yang dihasilkan dari program pemberdayaan perempuan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji *public value* pada program pemberdayaan perempuan berbasis kelompok usaha di wilayah pedesaan, penelitian ini berfokus pada program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) yang menyoal perempuan pengemudi ojek online sebagai kelompok rentan di sektor ekonomi informal. Meskipun GASPOL dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan perempuan pengemudi ojek online melalui berbagai pelatihan dan pendampingan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah permasalahan empiris, seperti keterbatasan peserta karena tuntutan pekerjaan, belum meratanya keberlanjutan usaha pasca pelatihan, serta masih banyaknya peserta yang bergantung penuh pada ojol sebagai pekerjaan utamanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

keberhasilan program tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan atau jumlah peserta kegiatan, melainkan perlu dilihat lebih jauh dari nilai publik yang mampu diciptakan dan dirasakan oleh para penerima manfaat.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, dalam konteks pelaksanaan upaya pemberdayaan perempuan melalui program GASPOL, nilai publik atau *public value* menjadi dasar utama yang berfungsi sebagai pedoman sekaligus alat kontrol dalam menjalankan program. Nilai publik juga menjadi acuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada selama implementasi program. Sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis dan mendeskripsikan *public value* dari program GASPOL dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan perempuan pengemudi ojek *online* di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya menjadi lebih berdaya dengan berfokus pada nilai yang benar-benar diharapkan dan dirasakan, dan bukan hanya menyoroti pada tujuan dan *output* program.

Dalam menganalisis dan mendeskripsikannya, penulis teori *Public Value* oleh Mark H. Moore (1995) sebagai landasan awal untuk memahami konsep penciptaan nilai publik, dan menggunakan dimensi penciptaan nilai publik dari Kelly, Mulgan & Muers (2002) yang memandang bahwa suatu organisasi tidak hanya disoroti dan diukur dari *output* yang dihasilkan tetapi juga pada mana tercermin dari tiga komponen utama kinerja organisasi publik, yaitu *Service* (layanan), *Outcomes* (hasil), *Trust/Legitimacy* (kepercayaan) untuk menelaah *public value* yang dihasilkan dan tercipta dari program pemberdayaan GASPOL yang diberikan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam hal ini penulis ingin menganalisis

lebih dalam melalui penelitian ini dengan judul “***Public Value* dalam Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) sebagai Upaya Pemberdayaan Ojol Perempuan di Kota Surabaya**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang dan data yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana *public value* (nilai publik) yang tercipta dari penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) sebagai Upaya Pemberdayaan Ojol Perempuan di Kota Surabaya?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis *public value* (nilai publik) yang tercipta dari penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) dalam Upaya Pemberdayaan Ojol Perempuan di Kota Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademik maupun praktis bagi banyak pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi administrasi publik khususnya terhadap pengembangan teori serta memperluas pemahaman

mengenai penerapan konsep *public value* (nilai publik) dalam konteks pemberdayaan perempuan melalui program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL). Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas tema serupa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat praktis bagi berbagai pihak sebagai berikut:

##### **1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian di bidang Administrasi Publik, khususnya mengenai implementasi konsep *public value* (nilai publik) dalam program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa ataupun lanjutan yang relevan di masa depan, khususnya yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik.

##### **2. Bagi Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta bahan masukan bagi DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam mengevaluasi pelaksanaan program GASPOL, khususnya terkait sejauh mana program tersebut menciptakan nilai publik bagi masyarakat. Temuan penelitian diharapkan dapat membantu memperkuat aspek pelayanan, efektivitas program, serta strategi pemberdayaan perempuan ke depan.

### **3. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman empiris dan pemahaman langsung tentang penerapan teori *public value* dalam konteks kebijakan publik di daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan kemampuan analitis dan metodologis mahasiswa, khususnya dalam Program Studi Administrasi Publik, untuk meneliti isu-isu pemerintahan dan pelayanan publik dalam praktik di dunia nyata.